

Resensi Buku:

MELAWAN LUPA TERHADAP TAN MALAKA^{*)}

Judul	<i>Verguisd en Vergeten. Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949.</i>
Penulis	Harry A. Poeze,
Penerbit	Serie Verhandelingen No. 250, KITLV, Uitgeverij, Leiden, 2007.
Tahun Terbit	2007/ 2013 *)
Tebal	III Delen (Tiga Jilid): xvii + 2093 halaman Tahun 2007



TAN MALAKA tentu tak sendirian. Ada banyak tokoh bangsa yang pernah dilupakan, sengaja atau tidak. Pepatah Jerman mengatakan “*Eine Vergangenheit die nicht vergehen will*” (Masa lalu yang ingin, tetapi tak bisa dilupakan). Entah itu karena perbuatan buruk atau karena prestasi dan sumbangannya untuk bangsa. Karma sejarah tampaknya seperti keniscayaan dalam riwayat hidup tokoh bangsa negeri ini. Ia menyisakan ironi sejarah. Ironi karena setelah malang melintang menjadi tokoh terkemuka pada zamannya, hari-hari terakhir mereka

mereka harus berakhir dengan menyedihkan; dinista, lalu dilupakan oleh rejim. Inilah misalnya yang terjadi pada diri Soetan Sjahrir, perdana menteri pertama RI, yang dijabatnya tiga kali berturut-turut pada masa perjuangan kemerdekaan (1945-1947). Namun di akhir hayatnya ia merana dalam tahanan rejim Soekarno; sakit-sakitan, lalu diizinkan berobat ke Swiss tapi akhirnya meninggal di sana, saat masih dalam status tawanan pada tahun 1963.

Presiden Soekarno tokoh utama yang memenjarakan Sjahrir, akhirnya juga mengalami nasib yang hampir sama dengan korbannya. Begitu juga mantan perdana menteri Moh. Natsir, seperti halnya dengan Soekarno, harus menerima takdirnya sebagai tawanan rumah sampai akhir hayatnya oleh rejim Orde Baru. Nasib yang hampir sama juga dialami oleh

*) Naskah asli dari tulisan resensi ini didasarkan pada pembacaan edisi aslinya, semula diniatkan untuk diterbitkan pada media cetak nasional, tetapi karena ketinggalan aktualitasnya dikembalikan lagi. Dengan beberapa revisi tulisan ini diterbitkan kembali untuk jurnal kita ini. Mestika Zed.

Soeharto. Setelah berkuasa selama lebih 30 tahun dan dipuja sebagai “bapak pembangunan”, di hari-hari terakhirnya orang kuat Orde Baru itu diadili media, dihujat dan sekaligus dipuja, bahkan selagi masih dalam keadaan sekarat. “Dosa-dosanya” dihitung dengan statistik dan matriks. Liputan media itu sendiri pada masanya menjadi saksi kebesaran ‘jenderal besar’ itu, tetapi pada saat yang sama, bangsa Indonesia benar-benar melewati “minggu yang penuh aib” (*de week der schande*), meminjam istilah dari sejarawan Belanda di masa lalu.

Sebuah peradaban yang rendah tanpa prikemanusiaan sedang ditunjukkan oleh media dan oleh komentator serta mayoritas pemirsanya yang hanyut terbuai dalam sikap pro-kontra tanpa muatan informasi yang cukup. Sejatinya, bangsa ini mestinya bisa hening sejenak, barang sehari cukuplah, diiringi dengan musik duka. Namun hal ini tampaknya musykil bagi sebuah bangsa yang sedang mati rasa.

Masih pada saat yang hampir bersamaan, kondisi semacam ini berlangsung di ibukota. Siapa yang kenal dan peduli dengan nasib Jusuf Ronodipura, arsitek utama dalam menyiasati penyebaran berita proklamasi 17 Agustus 1945 dan tokoh yang banyak jasanya di belakang layar perundingan Indonesia Belanda? Meninggal pada hari yang sama dengan Soeharto, Minggu 27

Januari 2008. Di hari-hari terakhirnya Pak Jusuf – demikian beliau dipanggil sejawatnya, juga dirawat di rumah sakit; ia nyaris ditelantarkan oleh negara yang pernah diperjuangkannya. Untunglah ada petinggi negeri ini yang berempati secara pribadi, sehingga kesulitan dalam ‘urusan rumah sakit’ bisa teratasi. Ia akhirnya meninggal dalam keheningan yang memekakkan.

Ilustrasi selanjutnya mungkin berlebihan, tetapi dengan contoh kecil di atas bangsa Indonesia agaknya tidak hanya perlu menulis sejarah “orang hidup”, melainkan juga sudah saatnya untuk menulis bab tentang “sejarah kematian” tokoh bangsa yang penuh ironi itu, seperti yang pernah ditulis oleh sejarawan Ben Anderson, “How did the generals die?” – “Bagaimana sang Jenderal Meninggal?” (*Indonesia* no. 43, April 1987).

Akan halnya nasib Tan Malaka, tokoh nasionalis paling terkemuka dari generasi pertama juga mengalami nasib yang hampir sama, tetapi mungkin lebih tragis dan penuh ironi. Setelah mempersembahkan yang terbaik untuk bangsanya dengan segenap tenaga fisik dan energi inteletiknya, ia harus tewas diterjang pelor tentara dengan jasad dan kuburan yang tak tentu hutan rimbanya. Inilah yang dicoba lacak oleh penulis buku ini dalam salah satu bab bukunya (Bab X, Jilid 3: hal. 1393-1494). Tetapi buku yang

sedang kita resensi ini tentu lebih dari itu.

Harry A. Poeze, sejarawan terkemuka Belanda, yang menulis tiga jilid buku tebal ini, mengungkapkan banyak misteri yang selama ini tetap ‘misterius’ dalam sejarah Indonesia. Sebelum penerbitan buku terbarunya ini, ia juga sudah menerbitkan naskah disertasinya berjudul *Tan Malaka. Strijder voor Indonesie's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945* (s’Gravenhage, 1976). Edisi terjemahannya berjudul *Tan Malaka. Pejuang Kemerdekaan Indonesia. Perjalanan Hidupnya dari 1897 sampai 1945* karena terlalu tebal diterbitkan dalam dua jilid.

Bagi kebanyakan sarjana Indonesia buku pertama Poeze tampaknya sudah sangat hebat. Rasanya tak ada lagi yang tak diungkapkannya dalam buku disertasinya itu. Namun bagi Poeze Tan Malaka tetap ‘misteri’. Kekagumannya terhadap Tan Malaka berbanding lurus dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, sehingga terbitlah buku barunya ini, malah jauh lebih tebal dari buku pertama. Judulnya, *Verguisd en Vergeten. Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949 (Dihujat dan Dilupakan. Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949)*. Buku ini adalah hasil perburuan data sejarah di berbagai negeri di Eropa, termasuk Moskow dan Indonesia selama lebih sepuluh tahun (h.xi)). Berbeda dengan buku

pertamanya, yang berasal dari disertasi yang diajukannya di Universiteit van Amsterdam (setebal 605 halaman),*) buku terbaru Poeze ini kecuali lebih tebal tiga kali lipat dari buku pertamanya, juga mengungkapkan banyak hal baru.

Terdiri dari tiga jilid tebal, dengan 13 bab, lebih dari 2093 halaman, buku ini melanjutkan episode sejarah hidup Tan Malaka yang terputus dalam bukunya yang pertama, yang berhenti pada tahun 1945. Dalam ketiga jilid buku ini Poeze secara khusus membahas episode sejarah yang tersisa, yakni tahun 1945-1949, bersepadan dengan era perjuangan kemerdekaan atau revolusi nasional. Episode pendek selama sekitar lima tahun ini dibahasnya dengan cermat dan sangat rinci dengan sumber yang sangat kaya.

Dalam ketiga jilid bukunya ini, Poeze memaparkan penggalan kisah perjuangan Tan Malaka sebagai pejuang revolusioner yang jatuh bangun bersama kelompok “kiri” (oposisi) yang dipimpinnya di bawah bendera “Persatuan Perjuangan” (PP), sebuah organisasi pemuda dari

*) Sudah diterjemahkan ke dalam edisi Indonesia, *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik*, yang mulanya direncanakan terbit dalam dua jilid, tetapi setelah penerbitan jilid pertama oleh Grafiti Pers, Jakarta (1988), buku itu segera dilarang beredar, sementara jilid dua tidak pernah terbit sampai setelah reformasi dengan judul *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik, 1925-1945* (1999) oleh penerbit yang sama.

garis keras sejak awal revolusi. Karakteristik perjuangan kelompok PP dapat digambarkan dalam satu gagasan utama: menuntut “kemerdekaan 100%” tanpa perlu berunding dengan Belanda. Selaku demikian, kemerdekaan tidak untuk dirundingkan melainkan untuk direbut dengan cara apa pun. Maka sebagai konsekuensi pandangan ini, kelompok PP senantiasa menentang politik perundingan yang dijalankan perdana menteri Sjahrir. Ini pula yang membuat kabinet yang dipimpinnya mengalami jatuh bangun, baik karena tantangan dari “dalam”, yakni dari kelompok kiri yang radikal (PP) di satu pihak maupun dari rongrongan kekuatan “luar”, yakni unsur kolonial Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia di lain pihak.

Untuk tidak menghilangkan konteks sejarah Tan Malaka sebelum 1945, Poeze menyediakan satu bagian non-bab (*non-chapter*) bagi pembacanya. Di situ dipaparkan kembali secara ringkas riwayat hidup Tan Malaka sejak kelahirannya (1897) di sebuah nagari Pandam Gadang, Suliki, Limapuluh Koto, Sumatera Barat. Setelah itu barulah masuk ke pembahasan bab per bab.

Jilid I setebal lebih delapan ratus halaman (hal. 1-820) terdiri dari lima bab tebal. Dalam jilid pertama ini Poeze bercerita secara kronologis mulai dari bab 1 tentang masa transisi dari masa Jepang ke “periode bersiap”, yaitu suatu periode yang meliputi kegiatan gerak-

an ‘bawah tanah’ Tan Malaka sampai ke situasi anarkhis antara bulan Agustus-Desember 1945; bab 2 membedah kekuatan kelompok “Persatuan Perjuangan” (PP); bab 3 tentang kasus ‘kudeta’ yang gagal dari kelompok radikal ini; bab 4 tentang “Benteng Republik”, sebuah aliansi kelompok radikal yang berposisi menentang politik perundingan Republik dengan Belanda” lewat PP (Juli ’46-Maret ’47). Akhirnya bab penutup, bab 5 tentang masa-masa krisis menjelang dan sesudah agresi militer pertama (Maret ’47-Agustus ’48).

Jilid II terdiri dari empat bab tebal (hal. 821-1391) mulai dengan bab 6, mengulas karya Tan Malaka, “*Dari Penjara ke Penjara*”, tiga jilid otobiografi yang ditulisnya dalam penjara; bab 7 tentang “kasus 3 Juli 1946”, bab 8 tentang berdirinya Partai Murba”, bab 9 tentang “pemberontakan PKI Madiun”. *Jilid III* terdiri dari empat bab (1393-2006), masing-masing bab 10 melacak bulan-bulan terakhir perjalanan hidup Tan Malaka dan bab 11 tentang jatuhnya kelompok radikal sampai penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949. Dua bab terakhir (12 dan 13) membahas warisan Tan Malaka (Partai Murba) dan timbulnya kembali kesadaran baru tentang sepak terjangnya terhadap perjuangan kemerdekaan, sehingga ia dianugrahi sebagai pahlawan nasional (Keputusan Presiden no. 53 Tahun 1963). Gelar pahlawan nasional dengan nomor urut no. 17

dari yang pernah diberikan negara kepada tokoh bangsa. Nomor satu diberikan kepada Abdul Muis (1883 - 1959), tokoh yang lebih dikenal namanya sebagai pengarang *Salah Asuhan*, padahal ia juga seorang aktivis politik terkemuka sejak usia muda. Ironi sejarah yang dilukiskan Poeze tentang nasib buruk yang menimpa Tan Malaka, ialah bahwa ia tewas di ujung bedil pasukan Republik sendiri, kemudian dilupakan (*vergetelheid*) sebelum akhirnya diangkat menjadi pahlawan nasional. Namun lebih celaka lagi, selama rejim Orde Baru Soeharto namanya dikubur dari buku sejarah. Barulah setelah kejatuhan rejim otoriter Soeharto atau Era Reformasi ada upaya untuk merajut kembali kepingan-kepingan yang tersisa (1965-2007).

* * *

Bagaimana biografi Tan Malaka ini harus dibaca oleh generasi anak bangsa hari ini? Di manakah tempat Tan Malaka dalam sejarah bangsanya? Jawaban penulis buku ini amat jelas, seperti ternukil dalam judul induknya: *Verguisd en Vergeten*. (“*Dinista dan Dilupakan*”). Nasibnya nyaris tak bedanya dengan kebanyakan tokoh bangsa yang lain, kurang mendapat perhatian dari negara, kecuali sekedar renungan seremonial di hari upacara peringatan “hari pahlawan” 10 November. Tiap tahun mengulangi rutinitas yang sama.

Akan tetapi pada diri Tan Makala ironi dan tragedi sejarah menjadi sempurna. Dengan judul bukunya itu, Poeze justru ingin melawan *amnesia* sejarah yang menghinggapi generasi rejim Orde Baru, bahkan sebenarnya juga dalam era reformasi dewasa ini. Buku ini tak hanya menggali misteri yang menyelimuti sejarah hidup Tan Malaka yang selama ini masih kabur, tetapi juga “mengoreksi” penggalan sejarah hidupnya yang sering dipahami secara keliru. Misalnya, benarkan Tan Malaka menjadi ‘dalang’ dari sebuah kudeta yang gagal pada 3 Juli 1946 itu? Tentang ini Poeze mengatakan, “Tan Malaka baru mengetahui pertama kali tentang “kudeta” (*staatsgreep*) lewat siaran radio malam hari tanggal 5 Juli, yang dikatakan dirancang oleh dirinya” (p. 493). Peristiwa itu sangat mengejutkan dirinya, tetapi media pemerintah sudah terlanjur mencapnya demikian. Peristiwa “5 Juli” itu begitu kompleks, lebih kompleks daripada kasus “kudeta G.30S/PKI 1965” yang multi-interpretasi itu. Terutama karena gejolak revolusi di antara aliran-aliran yang bersiteru tidak selamanya satu arah: menghadapi musuh bersama: Belanda, melainkan perselisihan internal di antara kelompok-kelompok yang menolak politik perundingan dan yang mendukungnya. Juga terjadi perpecahan dalam tubuh militer yang dikecewakan oleh politik perundingan.

Salah satu tema utama sejarah periode perang kemerdekaan ialah dialektika sejarah yang bergonta-ganti antara pilihan *perjuangan* (fisik) dan *diplomasi* (berunding). Di antara kedua pilihan itu, Tan Malaka adalah salah seorang tokoh yang selamanya menentang politik perundingan. Baginya kemerdekaan Indonesia 100% harus dicapai dengan perjuangan dan dengan itu baru ada perundingan.

Akan tetapi revolusi tidak hanya mengalir dalam irama *perjuangan* (fisik) dan *diplomasi*. Ia juga melibatkan berbagai kekuatan dan kepentingan-kepentingan politik di antara pelbagai kelompok dan aliran yang beragam, bahkan juga melibatkan dendam kusumat pribadi pun tak terelakkan. Poeze yakin bahwa kebanyakan pemimpin Republik tahu benar bahwa Tan Malaka tidak bersalah – dan karena itulah pemerintah resmi tidak pernah benar-benar berani menghadapkan dirinya ke muka pengadilan hukum. Ia langsung ditangkap begitu saja dengan hukum revolusi tanpa diadili atas tuduhan merancang kudeta. Dengan alasan demi “kepentingan negara” diperlukan seorang kambing hitam yang tak berdaya; dan tidak ada siapa-sapa yang lebih cocok untuk peranan ini daripada dia, tokoh yang kesepian.

Pihak pemerintah menutup kasus Tan Malaka. Sebab kalau kasus dibuka kepada publik, akan tertelanjangi pula adanya perpe-

cahan-perpecahan di kalangan elit politik dan militer. Ini tentu akan melemahkan semangat perjuangan bangsa dan akan membahayakan kedudukan Indonesia di mata dunia internasional. Benar juga, “revolusi lalu memakan anaknya sendiri”.

Akan tetapi ada alasan lain mengapa seorang revolusioner pengembara ini harus dikorbankan, dibungkam dan difitnah. Dialah satu-satunya pemimpin besar yang berpegang teguh secara konsekwen kepada kebijaksanaan *perjuangan* yang diambilnya. Lagi pula wibawa argumen perjuangan yang ditulis dalam bukunya membuat sikap politiknya menjadi satu alternatif yang masuk akal di mata orang banyak. Sekarang manakala para pemimpin sipil dan militer yang duduk di kursi kekuasaan membelakangi alternatif yang dikemukakan Tan Malaka, mereka merasa perlu – demi alasan-alasan politik dalam dan luar negeri – untuk menuliskan kontra alternatif, suatu *akhir* yang jelas kepada kebijaksanaan yang diambil pemerintah: meneruskan perundingan. Namun ini tidak dilakukan pemerintah secara memuaskan, sehingga perang tanding gagasan perjuangan waktu itu tampaknya lebih berpihak pada Tan Malaka. Tak ada cari lain untuk menghebtikannya, kecuali dengan menghabisi diri dan orang-orangnya.

Contoh lainnya ialah berkenaan dengan kasus pemberontakan PKI tahun 1926/27 yang terjadi di

wilayah: Sumatera Barat dan Banten. Ia tidak terlibat dengan aksi makar yang dituduhkan Belanda dan kawan-kawan separtainya, khususnya kelompok PKI Prambanan. Tan Malaka juga tidak pernah terlibat dalam ‘pemberontakan Madiun’ September 1948 itu, suatu klimaks yang menovonis dirinya sebagai salah seorang dalang bersama Muso. Padahal Tan Malaka sendiri berseberangan dengan Muso. Dalam dokumen sejarah Tan Malaka dapat dibuktikan bahwa sejak semula Tan Malaka tidak setuju dengan rencana aksi pemberontakan yang dilansir oleh kawan-kawan separtainya (PKI) dari kelompok Prambanan, Jawa. Menurutnya pemberontakan terhadap kekuasaan kolonial belum patut diletuskan karena partai belum kuat dan masih memerlukan dukungan aksi massa yang luas. Bagi Tan Malaka pemberontakan tahun 1926/27 adalah suatu tindakan blunder yang bisa menjadi “boomerang” terhadap partai sendiri.

Nyatanya memang demikian. Partai PKI hancur, babak belur dan orang-orang partai paska pemberontakan 1926/27 diburu-buru oleh PID dan sebagian besar aktivis partai dibuang ke Digul. Kegagalan pemberontakan itu ternyata berbuntut panjang. Orang-orang PKI menuduh Tan Malaka sebagai penyebab kegagalan pemberontakan dan sejak itu ia dimusuhi dan dicap pengkhianat partai, Trotsky-nya Indonesia.

Sejak awal 1930-an Tan Malaka sudah keluar dari PKI dan mendirikan PARI (Partai Republik Indonesia) di perantauan sebagai akibat perpecahannya dengan rekan-rekan separtainya, khususnya komunis Jawa aliran Prambanan, yang tak sabaran memilih jalan kekerasan. Pembentukan PARI itu sendiri juga berkaitan erat dengan sikap penentangan Tan Malaka terhadap kebijakan Komintern di Moskow. Sejak tahun 1920-an Moskow tampak lebih peduli untuk memanfaatkan Komintern buat kepentingan "hegemoni" Uni-Soviet-Rusia di dunia internasional ketimbang kepentingan perjuangan kaum nasionalis di daerah-daerah jajahan. Komintern juga cenderung mencurigai Pan Islamisme sebagai saingan internasionalnya, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Tan Malaka. Maka jelas kelihatan bahwa warna nasionalisme dalam diri Tan Malaka jauh lebih tajam daripada fanatisme terhadap ideologi (komunisme). Itulah pula yang telah mendorongnya untuk keluar dari Komintern dan mendirikan PARI tak lama setelah pemberontakan komunis yang gagal itu (1927).

Pada tahun 1948, Tan Malaka juga berseberangan dengan PKI Muso yang baru pulang dari Moskow dan yang merancang “pemberontakan Madiun” itu. Karena tidak lagi sejalan dengan Muso, maka pada tahun 1948 ia pun mendirikan Partai Murba. Dengan demikian ada tiga partai yang dibangun Tan Malaka (PKI, PARI

dan Murba). Tan Malaka sudah keluar dari PKI ketika orang-orang PKI terus menerus tak pernah jera dengan tindakan makarnya. Terakhir keterlibatan partai itu dalam G.30S/1965.

* * *

Tiga Stigma Tan Malaka.

Akan tetapi Tan Malaka tidak hanya dinista pada masanya. Ia pun dilupakan dengan penghilangan namanya dari sejarah bangsa. Rejim Orde Baru mengembangkan semacam ‘stigma’ yang sangat menyesatkan. *Pertama*, kiranya sudah jelas, seperti disinggung di atas, bahwa ia bukanlah tokoh yang suka makar, bahkan anti-pemberontakan. *Kedua*, stigma yang menyamaratakan antara gerakan komunis awal (*vroeg communist*) pada masa pra-proklamasi dengan komunis (PKI) paska 1945.

Komunis pada fase awal adalah sebuah kekuatan perjuangan nasional yang paling lantang menyuarakan sikap anti-kolonial dan mereka juga termasuk kelompok yang paling radikal dalam memperjuangkan Indonesia merdeka tanpa perlu berunding dengan Belanda. Stigma yang diberikan kekuasaan kolonial terhadap orang komunis dengan cap “extrimist” sepadan dengan stigma yang diberikan oleh kekuasaan Orde Baru terhadap PKI sebagai “pengkhianat” negara karena perbuatan mereka dalam kasus Madiun (1948) dan gerakan makar atau gerakan “kudeta” G.30 S. PKI/1965. Lagi

pula perlu dicatat, bahwa Tan Malaka sebenarnya sudah lama meninggalkan PKI. Karena jasa-jasanya ia bahkan telah diangkat Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional dalam tahun 1963. Namun di masa Orde Baru namanya dihilangkan dari sejarah.

Ketiga, stigma yang membesar-besarkan anggapan bahwa gerakan komunis (PKI) adalah anti-agama. Sampai tingkat tertentu agaknya memang demikian. Namun kelompok komunis awal, atau sebelum perang tidaklah anti-agama. Sebagian besar pengikut komunis adalah bergama Islam dan sikap mereka umumnya sangat berhati-hati dan tetap menghargai agama, meskipun mereka, khususnya Tan Malaka, sangat kritis terhadap sikap-sikap keberagamaan dan gaya politik kelompok Islam yang ambivalen dalam hubungan dengan sikap kooperatif dengan penguasa kolonial. Mereka ini malah juga sangat sadar tentang peranan agama, khususnya Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia.

Dalam kaitan ini pula mengapa Tan Malaka sangat menentang keras sikap Moskow yang cenderung memusuhi dan bahkan menyepelkan Pan Islamisme, sebuah gerakan internasional yang berpusat di Timur Tengah yang menentang imperialisme. Gerakan Pan Islamisme juga memiliki pengaruh di Indonesia, terutama di kalangan kelompok ‘Islam modernist’. Habitatnya ada di Sumatera Barat. Sebaliknya Tan Malaka malah bersimpati dan menyokong gerakan Islam yang

sangat anti-kolonial di negeri jajahan. Di Indonesia penggabungan unsur Islam dan komunis bukanlah mustahil, seperti yang tampak jelas dalam gerakan pemberontakan di Banten dan di Sumatera Barat tahun 1926/ 1927. Tokoh-tokoh komunis Padangpanjang dan Silungkang bahkan tidak pernah meninggalkan sembahyang dalam pelarian mereka ketika dikejar-kejar oleh intelijen Belanda. Selain itu stigma terhadap penggunaan kata “oposisi” dan “kelompok kiri” yang di masa Orde Baru sangat “tabu”. Padahal di masa revolusi nasional (1945-1949) dan bahkan di tahun 1950-an, keduanya adalah kosa kata politik yang ‘normal’ dalam bursa perpolitikan nasional.

* * *

Akhirnya dalam buku ini, Poeze telah menunjukkan bahwa Tan Malaka tidak hanya sebagai salah seorang tokoh utama yang memainkan peran sentral dalam percaturan politik revolusi, tetapi terlebih lagi menjadi simbol – yakni simbol perjuangan yang dihormati oleh sedemikian banyak pengikutnya dan simbol pengikat antara pemimpin dan pengikutnya bagi orang-orang yang sependirian dengannya serta simbol penistaan tidak hanya terhadap Tan Malaka dan orang-orangnya, tetapi juga terhadap jasa-jasa pahlawan yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya (h. 2001), terutama setelah rejim Orde Baru berkuasa. Sejarah tidak mesti hanya sekedar pemaparan cerita tentang fakta-fakta, tetapi juga memuat

interpretasi dengan gambaran atau ‘narasi masa lalu’ yang dikonstruksikan berdasar-kan kepentingan-kepentingan. Kepentingan politiklah yang membuat nasibnya buruk dan menderita. Kepentingan akademik adalah kepentingan untuk mencari dan menemukan kebenaran lewat metode riset. Dan ini telah dilakukan Poeze dengan baik.

Pembaca yang sempat membaca buku Poeze yang pertama (Tan Malaka 1897-1945) akan dapat mengikuti sepak terjang Tan Malaka sebagai salah seorang dari segelintir tokoh nasionalis yang sudah memiliki reputasi internasional sebelum PD II (Satu lagi adalah haji Agus Salim). Riwayat hidupnya yang penuh teka-teki “bagaikan cerita detektif, yang penuh ketegangan” tulis Alfian (1978). Dan ini telah dikupas tuntas oleh Poeze dengan menelusuri gelombang pasang surut kehidupan dan petualangannya. Sebagai politikus yang canggih, Tan Malaka juga pemikir yang menulis banyak buku yang visioner. Barangkali dialah pemikir politik pertama yang mampu menggambarkan bagaimana seharusnya nasib masa depan Indonesia dalam bukunya *Naar de Republiek* (1924). Malangnya ia telah meninggalkan bangsanya dalam keadaan tidak merdeka 100% karena ia tewas ditembak tentara di desa Modjo, Jawa Timur Februari 1949 (h. 1466).

Apabila generasi hari ini masih bertanya-tanya apakah Indonesia sudah “merdeka 100” seperti yang dituntut Tan Malaka, maka jawabnya tergantung dari sudut mana Anda memandangnya. Poeze, tak syak lagi, adalah profesional dengan pekerjaannya sebagai sejarawan terkemuka Belanda. Meskipun tidak menyembunyikan simpatinya dengan perjuangan Tan Malaka ia telah mengabdikan profesi akademiknya selama sepuluh tahun untuk menyelesaikan buku ini dengan berburu sumber di Eropa dan di Indonesia (khususnya Jawa), baik dalam bentuk dokumen/arsip, maupun wawancara-wawancara sejarah lisan. Sayangnya Poeze sama sekali tidak sempat menggunakan sumber data-nya di luar Jawa, misalnya, untuk menelusuri jaringan pergerakannya di Sumatera misalnya. Untunglah kelemahan ini dapat teratasi dengan terbitnya buku *Tan Malaka dan Gerakan Kiri di Minangkabau* (2007), karya Dr. Zulhasril Natsir, dosen/ peneliti komunikasi UI. Bagaimanapun Poeze dengan buku ini telah memberi sumbangan yang amat berharga bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk bangsa Indonesia khususnya, terutama berkat dukungan profesionalisme dan finansial dalam menggali sejauh mungkin misteri sejarah Indonesia yang sering ‘misterius’ itu. Jika suatu saat buku ini dapat diterjemahkan ke dalam edisi bahasa Indonesia, perlawanan terhadap pelupaan terhadap Tan

Malaka bersama Poeze, tentu akan menolong sedikit banyak penyembuhan penyakit amnesia sejarah orang Indonesia. ***

Mestika Zed,

Alumnus Vrije Universiteit, Amsterdam,
Direktur Pusat Kajian Sosial-Budaya &
Ekonomi (PKSBE)
FIS, Univ. Negeri Padang.